



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah diperkenalkan Sistem AKIP suatu sistem manajemen Pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh penggunaan anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam Sistem AKIP, Keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja, Capaian Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Februari 2024

Plt, INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SALIM, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19721230 200012 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Cascading Kinerja.....	3
	1.2 Tugas Fungsi.....	7
	1.3 Isu-Isu Strategis.....	9
	1.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana.....	11
	1.5 Tindak Lanjut Atas Laporn Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022.....	13
BAB II	Perencanaan Kinerja.....	18
	2.1 Tujuan,Sarana dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	18
	2.1.1 Tujuan.....	18
	2.1.2 Sasaran.....	18
	2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	18
	2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
	2.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	23
	2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	24
	2.3.1 Struktur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan.....	24
	2.3.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung.....	27
	2.4 Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023.....	29
	2.5 Perjanjian Kinerja	
	2.5.1 Perjanjian Kinerja 2023	
BAB III	Akuntabilitas Kinerja.....	32
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
	3.1.a Membandingkan Antara Target dan Realisasi.....	32
	3.1.b Perbandingan Capaian Kinerja.....	35
	3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini, dengan Target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah	
	3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	
	3.1.e Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif.....	39
	3.1.f Analisis Program/Kegiatan/ Kegiatan Penunjang keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	39
	3.2 Efisien Sumber Daya Dab Realisasi Anggaran.....	41
	3.3 Inovasi.....	44
	3.4 Penghargaan.....	45

BAB IV	PENUTUP.....	47
--------	--------------	----

- Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja
2. Buku Inventaris
3. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023

BAB. I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang digunakan sebagai bahan kebijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Daerah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

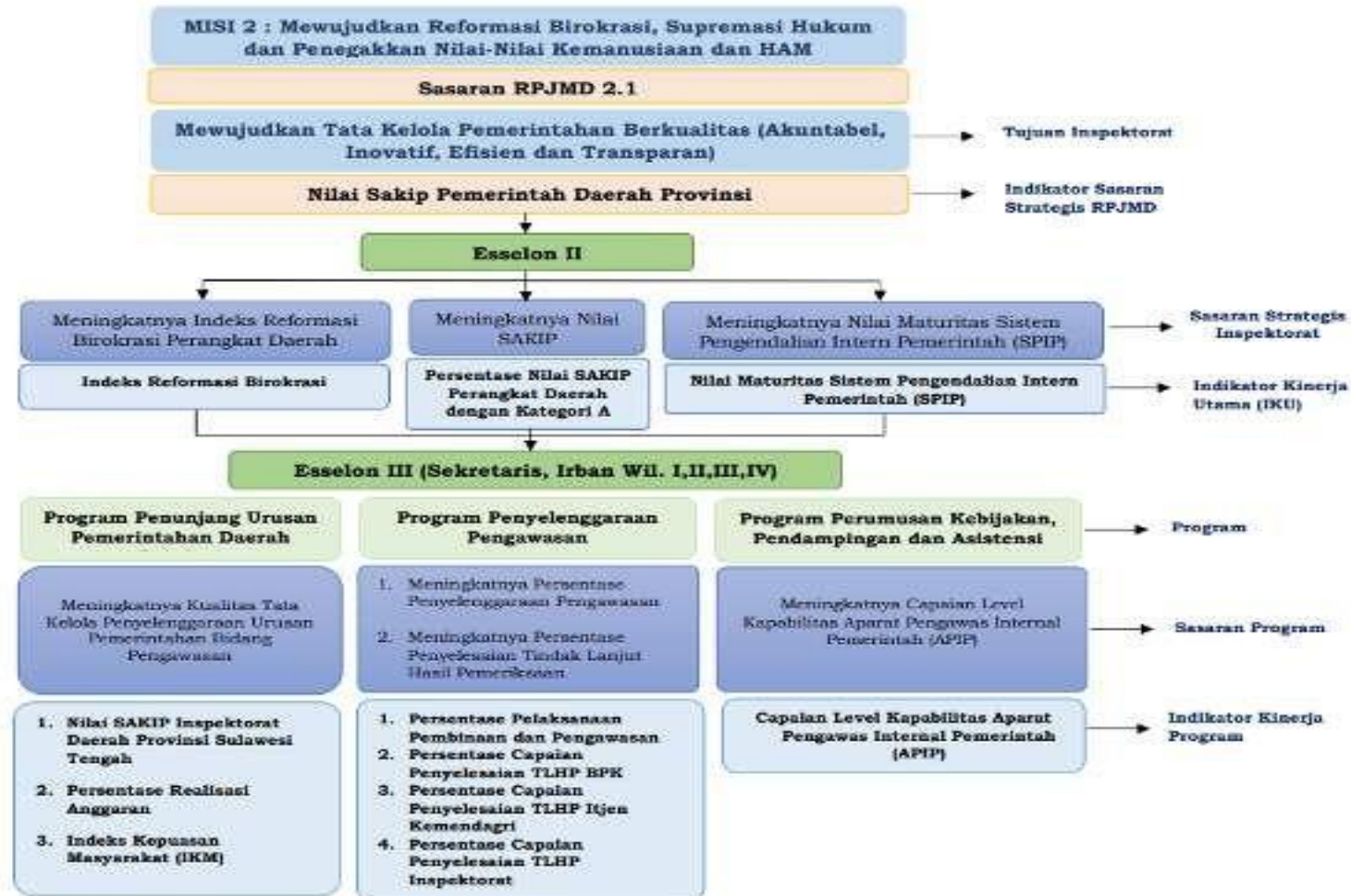
terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang

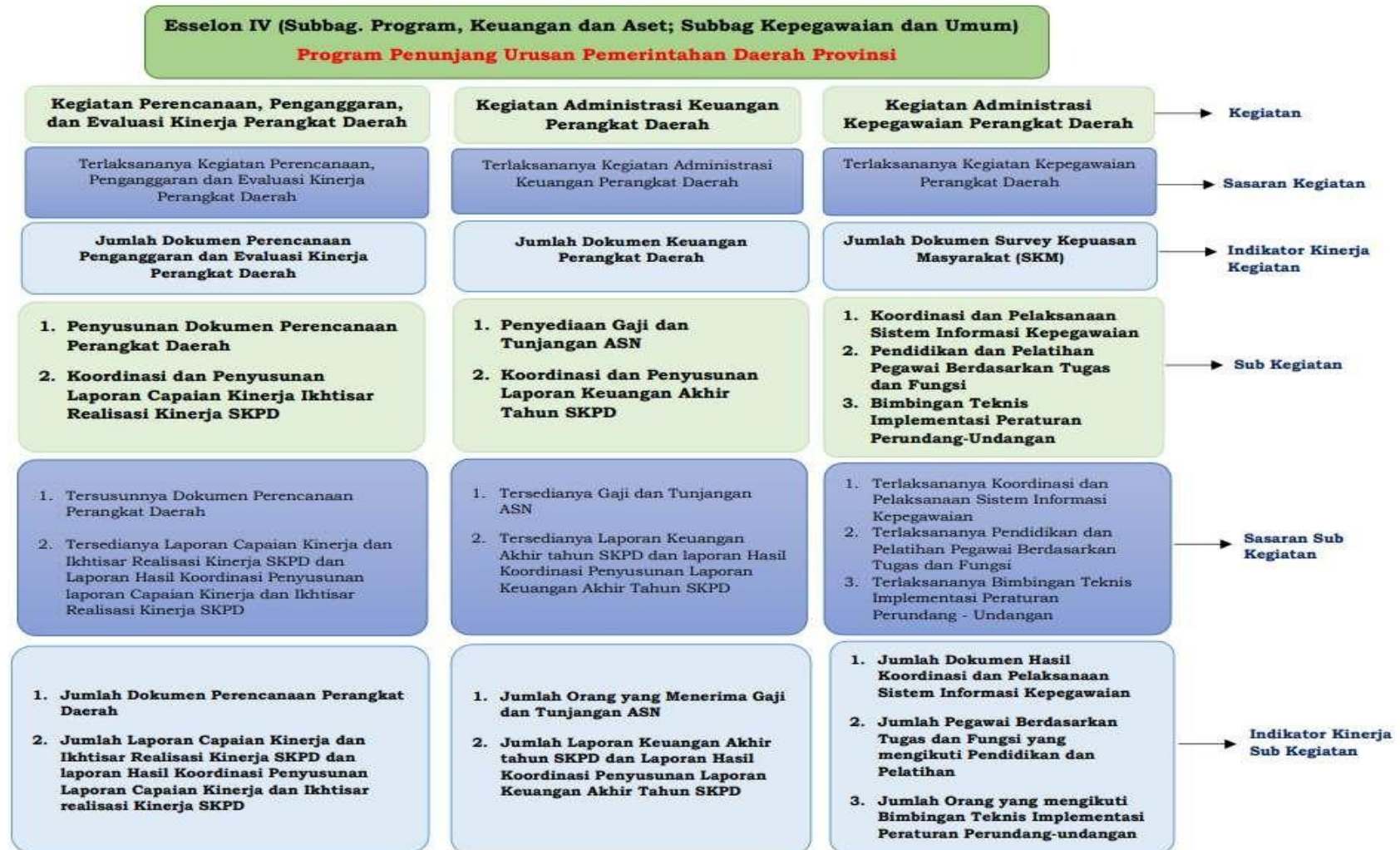
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Cascading Kinerja

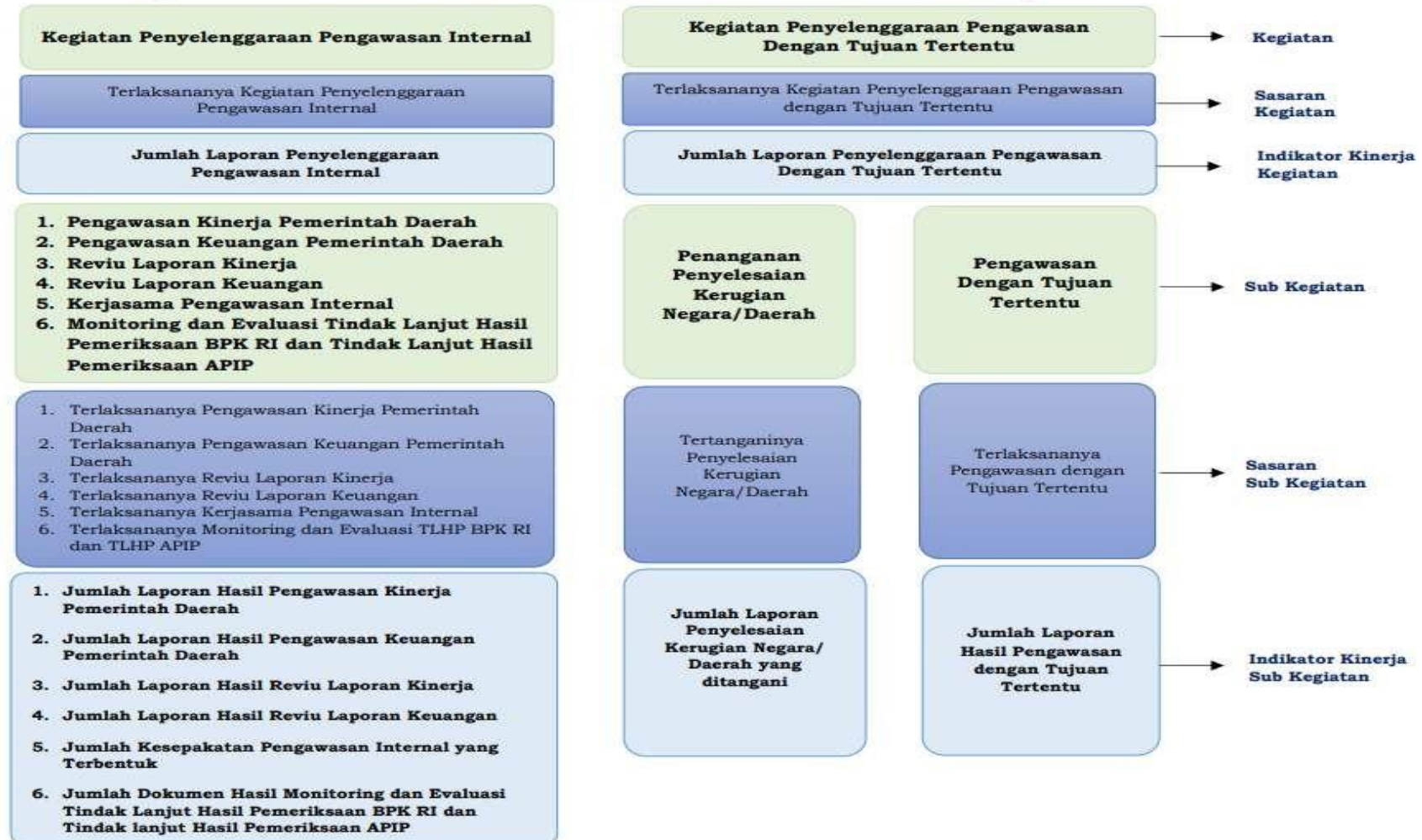
**CASCADING INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**





Eselon IV (Subbag. Program, Keuangan dan Aset, Jafung Auditor/PPUPD)

Program Penyelenggaraan Pengawasan



Eselon IV (Subbag. Program, Keuangan dan Aset, Jafung Auditor/PPUPD)

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 12 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Prangkat Daerah, yakni :

➤ **Tugas**

Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan / atau Menteri;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

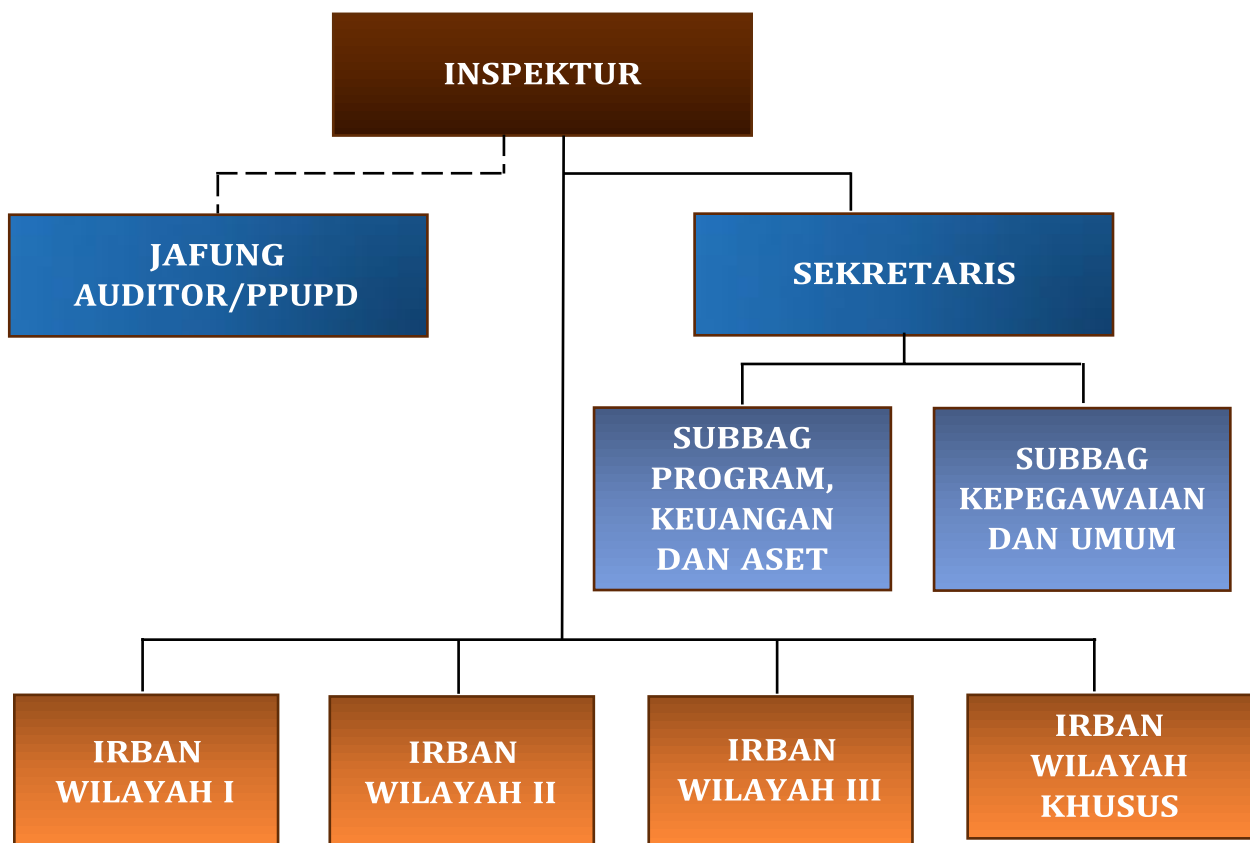
➤ **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

*(Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat)*



1.3 Isu – Isu Strategis

Memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh informasi – informasi mengenai berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal dan mencermati aspek – aspek atau faktor – faktor mengenai berbagai peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal dalam kerangka pelaksanaan mandate dan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kespala Daerah.

Dengan menggunakan metode analisis SWOT ini, dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial sertaskala prioritasnya, dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni :

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
1. Ketersediaan sarana/alat pengawasan dan Sumber Daya Manusia	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2. Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independent
3. Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi	3. Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4. Tingginya animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4. Belum menerapkan system pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Rewaed and Punishment)
5. Penyerapan anggaran yang optimal	5. Kurangnya ketersediaan anggaran pengawasan

PELUANG (Opportinuties)	TANTANGAN (Threaths)
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat	1. Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah
2. Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2. Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraph penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Efektivitas dampak hasil pemeriksaan	3. Jumlah temuan/pelanggaran masih relative tinggi
4. Adanya penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas	4. Kapabilitas APIP pada level 2 dengan catatan dan sudah harus menuju ke level 3 penuh
5. Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5. Penyelesaian terhadap kasus pengaduan

➤ **Permasalahan Utama**

Permasalahan utama yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Masih banyaknya temuan-temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK RI), Inspektorat yang belum di tindak lanjuti;
2. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP;
3. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah di OPD;
5. Masih belum optimalnya OPD dalam menerapkan SAKIP;
6. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh OPD.

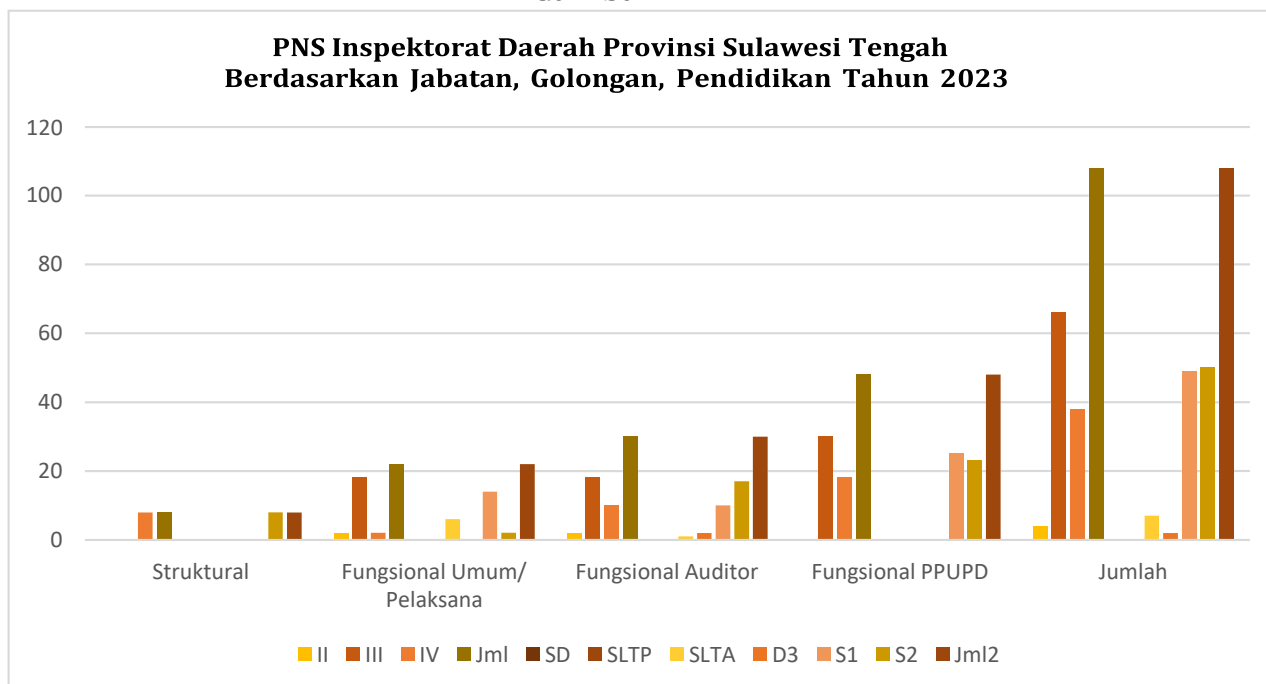
1.4 Dukungan SDM Dan Sarana Prasana

➤ Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut :

Gambar 1.4.1

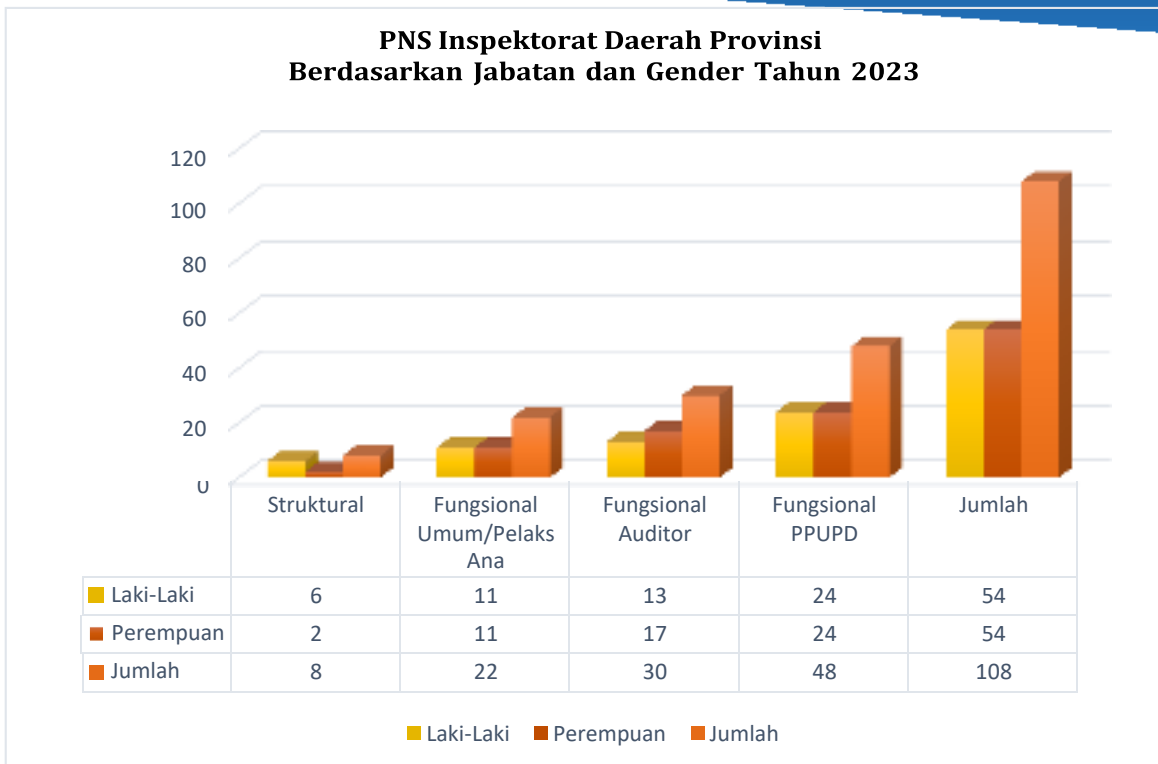


Tabel 1.4.1

No	Jabatan	Golongan				Pendidikan						
		II	III	IV	Jml	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jml
1.	Struktural	-	-	8	8	-	-	-	-	-	8	8
2.	Fungsional Umum/ Pelaksana	2	18	2	22	-	-	6	-	14	2	22
3.	Fungsional Auditor	2	18	10	30	-	-	1	2	10	17	30
4.	Fungsional PPUPD	-	30	18	48	-	-	-	-	25	23	48
Jumlah		4	66	38	108	0	0	7	2	49	50	108

(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023)

Gambar 1.4.2



(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023)

Gambar 1.4.3

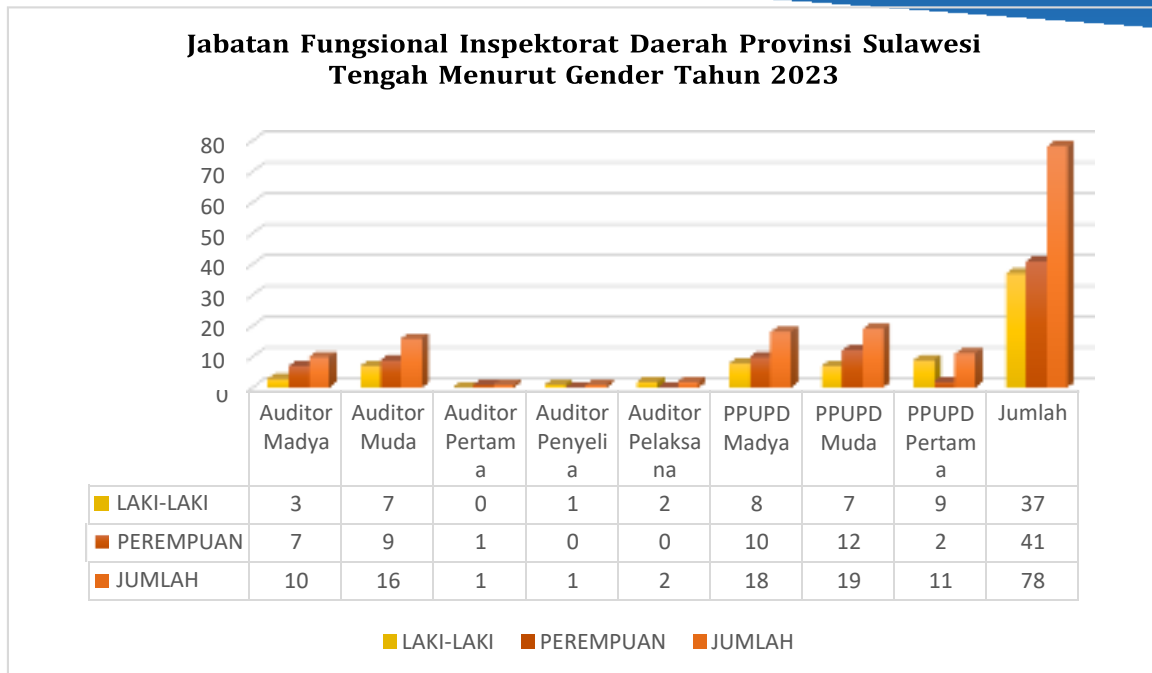


Tabel 1.4.3

No.	Latihan Penjenjangan	Jumlah
1.	Dilkat PIM I	0
2.	Spamen/Diklat PIM II	1
3.	Spama/Diklat PIM III	6
4.	Adum/Diklat PIM IV	8
Jumlah		15

(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023)

Gambar 1.4.4



(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023)

➤ Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Tanah dan Gedung sendiri yaitu Tanah pada tanggal, 31 Desember 1992 dan Gedung pada tanggal 31 Desember 2004 terletak di Jalan Dewi Sartika No. 47 Palu merupakan Jalan Raya Kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi. Tanah telah bersertifikat seluas 7316 M² Gedung seluas : 216 M² . Adapun Inventaris sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2022 sebagaimana terlampir.

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

➤ Uraian Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh skor 81,3 nilai maksimum 100 atau predikat A (Memuaskan). Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai	% Capaian
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,9	83,00
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	4,8	80,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,1	90,00
1.c	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	26,4	88,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,8	80,00
2.b	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,1	90,00
2.c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang Efektif dan Efisien	15,00	13,5	90,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,25	75,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,6	80,00
3.c	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,75	75,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5	100
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7,50	3,75	50,00

	Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumberdaya yang memadai			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	12,50	10	80,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja				81,3

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, maka rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni :

- 1) Perencanaan Kinerja.
 - Melaksanakan aktifitas yang sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja.
 - Menyusun mekanisme yang jelas terkait pengumpulan data kinerja secara berkala.
- 3) Pelaporan Kinerja.
 - Menyusun laporan kinerja secara berkala.
 - Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dalam Laporan Kinerja.
- 4) Evaluasi Kinerja.
 - Melaksanakan evaluasi atas rencana aksi, dan hasil evaluasi di tindak lanjuti secara nyata dan berkesinambungan.
 - Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan dilaksanakan sesuai standar.
 - Evaluasi kinerja yang dilaksanakan harus didukung oleh teknologi informasi (aplikasi yang terintegrasi) untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi atas kinerja.
 - Menyusun hasil evaluasi atas rencana aksi tertulis, dan menindaklanjutinya dalam bentuk langkah nyata.

Dari rekomendasi tersebut di atas, adapun Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni untuk point :

- 1) Perencanaan Kinerja, dengan melakukan perbaikan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2023 serta aktivitas yang mendukung kinerja, dimana Sekretaris, Irban Wilayah I, II, III, dan IV selaku penanggung jawab atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Pengukuran Kinerja, dengan telah membuat SK Pedoman Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Tahun 2023.
- 3) Pelaporan Kinerja :
 - Telah disusun laporan kinerja secara berkala.
 - Akan memasukkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dilevel nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dalam laporan kinerja berikutnya.
 - Telah melakukan publikasi pada Website Inspektorat terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4) Evaluasi Kinerja, dengan :
 - Telah dilaksanakannya evaluasi atas rencana aksi pada setiap triwulan.
 - Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan sesuai dengan SK Pedoman Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja tahun 2023.
 - Telah dilakukan evaluasi kinerja pada Aplikasi SEPKIP yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Telah disusun hasil evaluasi atas rencana aksi secara tertulis dan ditindaklanjuti pada evaluasi berikutnya.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan tujuan Perangkat Daerah sebagai arah strategis menuju perbaikan sesuai dengan fungsi Perangkat daerah, tujuan tersebut adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan).”**

2.1.2 Sasaran

Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- Meningkatnya nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) serta mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan output dengan outcome. Sehubungan dengan hal tersebut, Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku APIP telah melaksanakan kegiatan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Secara umum, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 yakni :

1. Evaluasi LPPD di Kabupaten;
2. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Pengawasan Umum;
3. Audit Ketaatan Mess Pemda Prov. Sulteng di Jakarta/Audit Pada Badan Penghubung Prov. Sulteng Tengah Tahun Anggaran 2023 di Jakarta;
4. Audit Ketaatan;
5. Audit Kinerja;
6. Evaluasi SPIP;
7. Evaluasi SAKIP OPD;
8. Evaluasi Manajemen Risiko;
9. Pengawasan Pelayanan Publik di Provinsi;
10. Penyelenggaraan SPM OPD;
11. Pengawasan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dalam Pelaksanaan Urusan;
12. Perhitungan Pelaksanaan Fisik Kegiatan Bencana Alam;
13. Audit Dana BOS di Kabupaten/Kota;
14. Monev Dana Desa di Kabupaten;
15. Pemeriksaan Fisik Pelaksanaan Dana Pokir 2023 di Kabupaten/Kota;
16. Pemeriksaan BUMD;
17. Evaluasi Penyerapan Anggaran PBJ;

18. Reviu Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
19. Reviu Dokumen Pelaksanaan Dana Pokir 2023 di Kota;
20. Audit Penerimaan Daerah;
21. Reviu Jumlah Penerimaan Pembayaran 50% Tunjangan Hari Raya;
22. Reviu DAK Sub Bidang Kelautan : Pra Kontrak Tahap 1, 2 Tahun 2023, dan Tahap 3 Tahun 2022;
23. Reviu DAK Sub Bidang SMA/SMK/SLB : Pra Kontrak Tahap 1, 2 Tahun 2023, dan Tahap 3 Tahun 2022;
24. Reviu DAK Fisik Reguler Sekaligus Campuran RSUD Undata;
25. Reviu DAK Fisik Tahap 3 TA. 2022 pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air;
26. Reviu DAK Sub Bidang Pengembangan Food Estate pada Dinas CIKASDA : Pra Kontrak Tahun 2023;
27. Reviu DAK Sub Bidang Pengembangan Food Estate pada Dinas CIKASDA Tahap 1, 2 Tahun 2023, dan Tahap 3 Tahun 2022;
28. Reviu DAK Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan pada DINKES Pra Kontrak, Tahap 1, 2 Tahun 2023 dan Tahap 3 Tahun 2022;
29. Reviu DAK Tahap 3 Reguler Sekaligus Campuran TA. 2022;
30. Reviu Kontrak dan Fisik TA. 2022;
31. Reviu Kontrak dan Fisik TA. 2023;
32. Pra Reviu dan Persetujuan Kontrak Dana Alokasi Khusus (DAK);
33. Reviu DAK Fisik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahap 3 TA. 2022;
34. Reviu DAK Fisik Dinas Kehutanan tahap 3 TA. 2022;
35. Reviu DAK Fisik tahap 1,2 TA. 2023;
36. Reviu RKPD Pemda;
37. Reviu RKPD Perubahan Pemda;
38. LPPD Pemda;
39. Reviu Mutasi, Rotasi dan Promosi ASN;
40. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

41. Reviu HPS (Pengawasan Proyek-Proyek Strategis);
42. Reviu HPS;
43. Reviu RKA OPD;
44. Reviu RKA Perubahan OPD;
45. Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak;
46. Reviu KUA-PPAS;
47. Reviu LKPD;
48. Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah;
49. Reviu SSH/ASB/HSPK;
50. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP;
51. Pemeriksaan Pengaduan di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Lainnya;
52. Probitiy Audit;
53. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Morowali, Parigi Moutong;
54. Investigasi;
55. Pendampingan ke Kabupaten;
56. Pendampingan BPK, Itjen;
57. Evaluasi PMPRB;
58. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan MCP dan Saberpungli).

Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 s/d 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke :				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	62	64	66	68	70,05
		Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10,42% (5 PD)	33,33% (16 PD)	41,67% (20 PD)	62,50% (30 PD)	100% (48 PD)
		Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai 3,20)	Level 3 (Nilai 3,40)	Level 3 (Nilai 3,50)	Level 3 (Nilai 3,60)	Level 3 (Nilai 3,70)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan setiap program/kegiatan/sub Kegiatan OPD. Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026

Visi	: Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
Misi 2	: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Menciptakan Birokrasi Instansi Pemerintah yang bersih, efektif, profesional dan melayani	Melakukan fokus perubahan minsed dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik Perbaikan tata Kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital Deregulasi kebijakan Peningkatan profesionalitas SDM Efektivitas pengawasan internal
	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal	Melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Melaksanakan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Melaksanakan Kerjasama Pengawasan Internal Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan	Melaksanakan Evaluasi atas implementasi SPIP Perangkat Daerah Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko Melaksanakan koordinasi dan monitoring pencegahan tindak pidana korupsi
		Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tabel 2.3.1
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1.	Meningkatkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.208.473.278,00	18.223.399.864,00	14.926.586,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.860.850,00	2.884.850,00	(126.976.000,00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.016.000,00	0,00	(127.016.000,00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.884.850,00	2.884.850,00	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.378.230.578,00	16.905.231.164,00	(472.999.414,00)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.224.350.578,00	16.724.351.164,00	(499.999.414,00)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	153.880.000,00	180.880.000	27.000.000,00

No.	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
2.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.381.850,00	1.315.283.850,00	614.902.000,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.200.000,00	321.950.000,00	221.750.000,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	538.844.350,00	931.996.350,00	393.152.000,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.337.500,00	61.337.500,00	0,00
		Penyelenggaraan Pengawasan	5.201.076.000,00	6.431.054.000,00	1.229.978.000,00
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.883.326.000,00	6.054.634.000,00	1.171.308.000,00
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.062.800.000,00	2.113.504.000,00	50.704.000,00
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.473.110.000,00	2.543.750.000,00	1.070.640.000,00
		Reviu Laporan Kinerja	40.950.000,00	29.700.000,00	(11.250.000,00)
		Reviu Laporan Keuangan	209.700.000,00	232.500.000,00	22.800.000,00
		Kerjasama Pengawasan Internal	245.346.000,00	431.840.000,00	186.494.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	851.420.000,00	703.340.000,00	(148.080.000,00)

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	317.750.000,00	376.420.000,00	58.670.000,00
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	277.750.000,00	376.420.000,00	98.670.000,00
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	495.600.000,00	499.465.000,00	3.865.000,00
		Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.500.000,00	10.725.000,00	4.225.000,00
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.500.000,00	10.725.000,00	4.225.000,00
		Pendampingan dan Asistensi	489.100.000,00	488.740.000,00	(360.000,00)
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	169.950.000,00	274.740.000,00	104.790.000,00
		Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	259.150.000,00	214.000.000,00	(45.150.000,00)
		Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)

Tabel 2.3.2
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.894.198.016,00	4.725.468.430,00	1.831.270.414,00
1.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	84.610.000,00	76.960.000,00	(7.650.000,00)
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	84.610.000,00	76.960.000,00	(7.650.000,00)
2.	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.294.950,00	1.437.921.600,00	821.626.650,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.810.550,00	5.810.550,00	0,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.324.400,00	46.401.050,00	7.076.650,00
		Penyediaan Bahan/Material	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.160.000,00	1.140.710.000,00	814.550.000,00

No.	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/Berkurang
3.	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	480.369.016,00	995.641.862,00	515.272.846,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	480.369.016,00	995.641.862,00	515.272.846,00
4.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.530.684.050,00	1.596.206.453,00	65.522.403,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.020.900,00	366.062.553,00	23.041.653,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.187.663.150,00	1.230.143.900,00	42.480.750,00
5.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.240.000,00	618.738.515,00	436.498.515,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.450.000,00	120.450.000,00	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.790.000,00	51.620.000,00	-170.000,00

2.4 Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Capaian	Keterangan	Penjelasan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64	69,25	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Dengan Formulasi Komponen: 1.Pengungkit, yang terdiri dari: a.Aspek Pemenuhan 20% b.Aspek Hasil antara Area Perubahan 10% c. Aspek Reform 30% 2.Hasil, yang terdiri dari: a.Akuntabilitas Kinerja dan Perubahan 10% b. Kualitas Pelayanan Publik 10% c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10% d. Kinerja Organisasi 10%
2.	Presentase Nilai SAKIP Persangkat Daerah dengan Kategori A	Nilai	33,33	38,78%	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah OPD Nilai Sakip A <hr/> X 100% Jumlah OPD
3.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3 (Nilai 3,40)	3 (Nilai 3,24)	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian maturitas Penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Formulasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur: - Perencanaan Kinerja 30% - Pengukuran Kinerja 30% - Pelaporan Kinerja 15% - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel juga berorientasi pada hasil maka Pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan Perjanjian Kinerja guna mendukung berhasilnya Visi dan Misi Gubernur terpilih Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.5.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALIM, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Pih. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RUSDY MASTURA

Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH


H RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,
Pih. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 64
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A	33,33 % (16 PD)
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai 3,40)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.22.948.828.294,-	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.6.431.054.000,-	APBD
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.499.465.000,-	APBD
Jumlah	Rp.29.879.347.294,-	

Palu, 07 November 2023

**GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



[Signature]
BERNARDY MASTURA

**Pt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

[Signature]

SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

BAB. III AKUNTABILITS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penilaian capaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Komponen	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja				
Pelaporan Kinerja	6	9	15	30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15
	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 88 Tahun 2021

3.1.a Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta target dan capaian realisasinya seperti yang terlihat pada tabel 3.2 yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.a
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi. (Indeks)	64	64	100	SDM
2.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A. % (PD)	33,33% (16 PD)	38,78% (19 PD)	116,35	BPKP
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP. (Level)	Level Nilai 3,40	Level Nilai 3,40	100	BPKP

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 3 (Tiga) indikator kinerja tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Indeks Birokrasi Perangkat Daerah memiliki Target Indeks 64 di Tahun 2023 dimana realisasi berada pada Indeks 64 dengan capaian 100% hal ini perlu di tingkatkan di Tahun 2024 dengan target Indeks 66 Birokrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah memiliki Target sebesar

33,33 % dengan Kategori A sebanyak 16 Perangkat Daerah pada Tahun 2023 hal ini bertujuan untuk meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selama ini hanya mencapai kategori B sehingga Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen dalam hal peningkatan nilai atau capaian kategori Perangkat Daerah menuju kategori A hal ini dimulai pada Tahun 2023 sehingga target yang telah ditentukan diatas dapat

dicapai dan hal tersebut dapat dicapai bahkan melewati dari target yang ditentukan yaitu sebesar 38,78 % atau sebanyak 19 Perangkat Daerah mendapat nilai A dengan selisih realisasi sebesar 16,35 % atau capaian sebesar 116,35 % hal ini perlu di pertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga dari 50 Perangkat Daerah sisa 31 perangkat Daerah lagi yang perlu ditingkatkan nilai capaian melalui penguatan yang mana Perangkat Daerah yang masih bisa ditingkatkan dari segi nilai Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- c. Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai salah satu daya dukung guna mencapai Reformasi Birokrasi yang ada di Perangkat Daerah khususnya di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maka dengan demikian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah berkomitmen untuk dapat meningkatkan level maturitas SPIP di Perangkat Daerah sehingga Adapun hasil SPIP pada tahun 2023 dari penilaian BPK dari target yang ditentukan yaitu berada dilevel 3,40 pada tahun 2023 dan realisasi berada dilevel 3,40 dengan capaian 100% hal ini masih perlu ditingkatkan guna mencapai level yang lebih baik lagi untuk ke depannya.



3.1.b. Perbandingan Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan perbandingan capaian kinerja dengan capaian Indikator kinerja selama 3 (Tiga) Tahun kebelakang mulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 adapun perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.b
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Pada Tahun 2021 s/d 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya indeks reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Indeks	62	62	100	62	64	106,7	64	66	103,2
2	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A	%	2,08% (1 PD)	2,08% (1 PD)	100	10,42% (5 PD)	18,79% (16 PD)	220	33,33% (16 PD)	38,78% (19 PD)	120
3	Nilai Maturitas SPIP	Level Nilai	3,20	3,20	100	Level Nilai (3,20)	Level Nilai (3,40)	106,3	Level Nilai (3,40)	Level Nilai (3,50)	103

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut Dapat dilihat pada tabel

3.1.b. Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3 (Tiga) IKU yaitu :

1. Peningkata Indeks Reformasi Birokrasi dimana pada Tahun 2022 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada nilai 62 dan pada Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di targetkan Indeks Reformasi Birokrasi 64 dimana target ini naik 2 point dari Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 capaian Realisasi 100%, hal ini bisa terjadi dengan komitmen bersama dalam hal Pengendalian Intern Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Persentase Nilai Sakip Perangkat daerah dengan Kategori A. Dimana Pada Tahun 2022 hanya 5 (Lima) Perangkat Daerah yang dapat kategori A dengan target 10,42% dari 48 Perangkat Daerah dan pada Tahun 2022 ada peningkatan 18 Perangkat Daerah yang mendapat kategori A sehingga pada Tahun 2023'

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menargetkan 16 (Enam belas) Perangkat Daerah yang akan mencapai kategori A sehingga pada akhir evaluasi didapatkan 19 (Sembilan Belas) Perangkat Daerah yang mencapai kategori A dari target yang ditentukan hal ini akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan diakhir rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah SAKIP dengan kategori A mencapai 50 (Lima Puluh) Perangkat Daerah di tahun 2026'

3. Pada Tabel 3.1.b pada IKU ke 3 (Tiga) yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yaitu Pada Tahun 2021 Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya mencapai level 3,10 oleh penilaian BPKP sehingga upaya meningkatkan terus dilakukan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia serta minimnya Anggaran yang tersedia sehingga menghambat capaian Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah pada Tahun berikutnya pun yaitu pada Tahun 2022 Nilai Maturitas SPIP masih dilevel yang sama yaitu 3,20 sehingga Komitmen Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk

meningkatkan capaian Nilai Maturitas SPIP dengan segala upaya pada Tahun 2023 bisa mencapai level 3,40 yakni naik sebesar 0,10 dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlunya integritas, komitmen dan kerjasama yang baik dalam meningkatkan level maturitas SPIP dimasa yang akan datang.

3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini, dengan Target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu memenuhi ekspektasi terhadap target dan capaian rencana strategis tahun 2022-2026 yang sudah ditetapkan.

Kemajuan capaian sasaran strategis ini dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.c Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Relisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
	Mewujudkan Tata kelola Pemerintah Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan).				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66	70,05	66
2.	Persentase Nilai Sakip Perangkat daerah	% (PD)	38,78% (19 PD)	100% (48 PD)	38,78% (19 PD)
3.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Level	Level Nilai (3,50)	Level Nilai (3,70)	Level Nilai (3,50)

Pada tabel diatas dapat dilihat kemajuan capaian sasaran strategis Inspektorat ada beberapa Indikator kinerja utama yang melampaui dan serta mencapai target adapun indikator-indikator yang masih bisa ditingkatkan guna mempercepat mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 100% dari target 64 sesuai dengan target yang ditetapkan dimana naik 2 point dari Tahun 2022 Indeks, akan tetapi dengan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pencapaian realisasi kinerja guna menunjang kinerja Pemerintah Provinsi sehingga diharapkan pada tahun 2024 dapat mencapai hasil dari target yang ditetapkan dgn jumlah Indeks 66 dengan komitmen Bersama.
2. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kategori A hingga saat mencapai 19 (Sembilan Belas) Perangkat Daerah hal ini melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 33,33 persen menjadi 38,78 % hal ini tidak menutup kemungkinan pada Tahun 2024 Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat meningkat dengan signifikan mengingat Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah sudah memahami Tugas dan Fungsi Pokok Perangkat Daerah masing-masing sehingga dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah sehingga apabila melihat tabel diatas untuk mencapai 16 Perangkat Daerah Kategori A memerlukan 35,25 % sedangkan untuk dari total 50 Perangkat Daerah atau 100% pada akhir masa renstra yaitu pada Tahun 2026, agar dapat mencapai target tersebut diperlukan Kerjasama yang baik antara Perangkat Daerah dan Instansi terkait guna peningkatan kapasitas capaian kinerja masing- masing Perangkat Daerah.
3. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai kategori 3,40 sesuai dengan target yang ditetapkan akan tetapi dengan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pencapaian realisasi kinerja guna menunjang kinerja Pemerintah Provinsi sehingga diharapkan pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai hasil atau target yang ditetapkan sebesar 3,60 hal ini sejalan dengan komitmen

bersama dalam hal Pengendalian Intern Pemerintah guna kesadaran bersama untuk

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perangkat Daerah melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Pada saat ini belum ada nilai persentase SAKIP di tingkat Nasional mengingat pemeriksaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dilaksanakan setelah tahun berkenaan sehingga perbandingan realisasi untuk saat ini belum ada.

3.1.e Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada saat laporan ini dibuat dari hasil Analisa yang ada bahwa keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah dalam hal Nilai Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A melebihi dari Target disebabkan oleh adanya Komitmen Bersama dengan Kepala Perangkat Daerah guna Peningkatan Capaian Kinerja serta pengelolaan keuangan dan asset yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun solusi alternative untuk keseluruhan OPD adalah inspektorat membuka layanan kepada seluruh OPD untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam hal kebijakan maupun penatausahaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku baik secara tatap muka maupun secara online via zoom terhadap masing-masing wilayah obyek pemeriksaan.

3.1.f. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan kegiatan adalah sebagai berikut :

IKU	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	%
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrai Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100	2.884.850,00	2.884.850,00	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	100	16.905.231.164,00	15.931.169.366	94,24
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.315.283.850,00	1.249.966.423	95,03
Meningkatnya Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	6.054.634.000,00	5.596.347.667	92,43
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	376.420.000,00	283.500.000	75
Nilai Maturitas SPIP	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	10.725.000,00	10.725.000,00	100
		Pendampingan dan Asistensi	100	488.740.000,00	475.900.027	97,37

Dari tabel diatas dapat disimpulkan Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan ada 3 (3) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan adapun anggaran yang telah diberikan masih kurang memadai sehingga target yang ada dapat dicapai namun hanya berskala sebagai evaluasi pelaporan kinerja dimana tahap pembinaan Inpektorat tidak berjalan secara berkala sehingga pembinaan yang seharusnya berjalan di awal tahun hanya dilaksanakan melalui evaluasi pelaporan setiap akhir tahun atau tahun berikutnya akan tetapi walaupun anggaran yang terbatas dengan komitmen Inspektorat tetap melakukan pendampingan dan pembinaan guna peningkatan kapasitas pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah

3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp. 29.879.347.294 total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan/Sub kegiatan sebesar Rp. 28.188.698.660,- (94,34 persen) sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1,691,171,056,- (5,66 Persen).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran saat ini sudah memadai tetapi masih banyak tugas mandatori yang belum terakomodir ke dalam program /kegiatan/ sub kegiatan sehingga masih sangat kurang, hal ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak terutama bagi pengambil kebijakan sehingga kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang lebih baik.

Efisiensi Anggaran untuk penunjang IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

No	IKU	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrai Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100	2.884.850,00	2.884.850,00	100	0
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	100	16.905.231.164,00	15.931.169.366	94,24	5,76
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.315.283.850,00	1.249.966.423	95,03	4,97
2	Meningkatnya Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	6.054.634.000,00	5.596.347.667	92,43	7,57
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	376.420.000,00	283.500.000	75	25
3	Nilai Maturitas SPIP	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	10.725.000,00	10.725.000,00	100	0
			Pendampingan dan Asistensi	100	488.740.000,00	475.900.027	97,37	2,63

Dari tabel diatas dapat diasumsikan bahwa tingkat capaian efisiensi anggaran berdasarkan IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu berada ditren positif sehingga capaian kinerja dengan efisiensi anggaran berjalan secara sesuai dimana target IKU yang ditetapkan mencapai target bahkan target persentase Nilai SAKIP Kategori A melebihi dari target yang ditentukan yang semula hanya 16 Perangkat Daerah menjadi 19 Perangkat Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.2 berikut di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.948.828.294,00	21.822.225.966,00	95,09
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.844.850,00	2.844.850,00	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.844.850,00	2.844.850,00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.905.231.164,00	15.931.169.366,00	94,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.724.351.164,00	15.750.289.366,00	94,18
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	180.880.000,00	180.880.000,00	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.960.000,00	76.710.000,00	99,68
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	76.960.000,00	76.710.000,00	99,68
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.315.283.850,00	1.249.966.423,00	95,03
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	321.950.000,00	288.750.000,00	89,69
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	931.996.350,00	900.302.573,00	96,60

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.337.500,00	60.913.850,00	99,31
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.437.921.600,00	1.421.278.114,00	98,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.810.550,00	5.786.900,00	99,59
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.401.050,00	46.401.050,00	100
	Penyediaan Bahan/Material	245.000.000,00	245.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.140.710.000,00	1.124.090.164,00	98,54
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	995.641.862,00	986.587.500,00	99,09
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	995.641.862,00	986.587.500,00	99,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.596.206.453,00	1.539.314.863,00	96,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.062.553,00	358.970.013,00	98,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.143.900,00	1.180.344.850,00	95,95
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.738.515,00	614.354.850,00	99,29
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.450.000,00	117.317.100,00	97,40
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.620.000,00	51.565.750,00	99,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.668.515,00	445.472.000,00	99,73
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.431.054.000,00	5.879.847.667,00	91,43
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.054.634.000,00	5.596.347.667,00	92,43
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.113.504.000,00	1.890.303.690,00	89,44
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.543.750.000,00	2.469.630.000,00	97,09
	Reviu Laporan Kinerja	29.700.000,00	24.450.000,00	82,32
	Reviu Laporan Keuangan	232.500.000,00	171.150.000,00	73,61
	Kerjasama Pengawasan Internal	431.840.000,00	368.520.060,00	85,34
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	703.340.000,00	672.293.917,00	95,59
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	376.420.000,00	283.500.000,00	75,31
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	376.420.000,00	283.500.000,00	75,31
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	499.465.000,00	486.625.027,00	97,43

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.725.000,00	10.725.000,00	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.725.000,00	10.725.000,00	100
	Pendampingan dan Asistensi	488.740.000,00	475.900.027,00	97,37
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	274.740.000,00	274.610.000,00	99,95
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	214.000.000,00	201.290.027,00	94,06
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-
	Jumlah	29.879.347.294,00	28.188.698.660,00	94,34

Dari tabel diatas dapat pula disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan capaian realisasi berjalan sesuai dengan target, realisasi dan capaian yang diinginkan yaitu capaian persentase mencapai 94,34 dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 5,66, hal ini dapat tercapai disebabkan oleh adanya Komitmen Bersama, kerja sama dan peningkatan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan serta amanat Permendagri No. 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

3.3 Inovasi

Dalam rangka Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dituntut untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik sehingga dalam rangka meningkatkan peran dan layanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam rangka menunjang pembinaan dan pengawasan sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berinisiatif membuat terobosan dengan semakin majunya teknologi di era modern ini serta mengingat keterbatasan anggaran dan kemampuan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum memadai maka Inspektorat

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan Program e-Pengawasan dan e-TLHP aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan secara berkala untuk aplikasi e-Pengawasan ini yaitu semua pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan asset diupload di aplikasi e-pengawasan guna pembinaan dan pengawasan berkala secara berkesinambungan sehingga parameter pelaporan dan evaluasi oleh Inspektorat berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, Adapun aplikasi e-TLHP adalah aplikasi untuk Perangkat Daerah mengetahui apa saja temuan dan rekomendasi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah guna penyelesaian hasil pemeriksaan baik temuan BPK RI, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, maupun Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan penambahan fitur menu pelayanan untuk terhubung dengan Aplikasi SP4N LAPOR pada website resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat memfasilitasi/mengarahkan Masyarakat dalam penyampaian semua aspirasi dan pengaduan secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Pengembangan Aplikasi e-TLHP akan diupdate sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang profesional dan berkinerja tinggi pada Tahun 2023 telah dibuat aplikasi PKA dimana setiap melaksanakan tugas sesuai tupoksi hasil laporan dan data akan di input ke Link sehingga dimudahkan untuk mencari laporan dan data apabila diperlukan dikemudian hari karena sudah tersimpan di Aplikasi PKA dan Pimpinan dapat memantau hasil dari data dan laporan tersebut.

3.4 Penghargaan

Penghargaan yang telah diterima saat ini oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai 10 Provinsi yang tepat waktu dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian dalam Negeri Tahun 2019 yang diberikan pada Tahun 2021. Kemudian Piagam Penghargaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan Predikat Nilai A.

BAB. IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (Dua) sasaran, dan 3 (Dua) indikator kinerja sasaran.

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 3 (Ketiga) rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Dalam kurun waktu pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut masih ada yang belum mencapai target dan menemui hambatan sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas APIP di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum memadai disebabkan formasi rekrutmen calon auditor dan PPUPD/aparat pengawas/pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang masih membutuhkan fungsional Auditor

Dan PPUPD/Aparat Pengawas, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.

2. Kurangnya keikutsertaan Auditor dan PPUPD untuk mengikuti Sosialisasi dan Diklat-diklat yang menunjang intuisi dari pada seorang Auditor dan PPUPD tersebut, karena disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk peningkatan Sumber Daya dari Auditor dan PPUPD tersebut.
3. Masih kurangnya perhatian dari OPD dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan baik itu pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri maupun temuan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Masih kurangnya SDM ASN di Lingkup Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam memahami Tugas dan Fungsi dalam menerapkan Kebijakan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Kurangnya fungsi pengawasan atasan langsung terhadap bawahan serta evaluasi kinerja secara berkala.

Terhadap hambatan tersebut diatas, perlu adanya penyelesaian yaitu :

1. Komitmen Pimpinan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan, serta pengusulan formasi rekrutmen pegawai menjadi fungsional auditor maupun PPUPD.
2. Perlunya kerjasama antar stakeholder dalam hal Diklat / Bimtek guna Peningkatan SDM Fungsional Auditor maupun PPUPD.
3. Adanya komitmen dan perhatian para kepala PD dalam mempercepat proses penyelesaian temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dengan cara berkoordinasi dengan aparat pengawas internal dan membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang ada di PD.
4. Perlunya Penambahan Anggaran kepada Inspektorat dalam hal peningkatan SDM APIP.

5. Perlunya fungsi pengawasan atasan langsung terhadap mengontrol dan meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan anggaran yang dikelola.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta adanya solusi dari masalah selama 1 (satu) tahun kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Februari 2024

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721230 200012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Pih. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RUSDY MASTURA**

Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

H RUSDY MASTURA

**PIHAK PERTAMA,
Pih. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 64
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A	33,33 % (16 PD)
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai 3,40)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.22.948.828.294,-	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.6.431.054.000,-	APBD
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.499.465.000,-	APBD
Jumlah	Rp.29.879.347.294,-	

Palu, 07 November 2023

**GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



[Signature]
FERDY MASTURA

**Pt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

[Signature]
SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 64
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A	33,33 % (16 PD)
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai 3,40)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.22.948.828.294,-	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.6.431.054.000,-	APBD
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.499.465.000,-	APBD
Jumlah	Rp.29.879.347.294,-	

Palu, 07 November 2023

**GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



HERUNDY MASTURA

**Plt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di

Nama : **MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang terdapat dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 N

PIHAK KEDUA,

**Plt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,

**SEKR
INSPEKTOR
PROVINSI SUL**

MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina
NIP. 1966070

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Realisasi Anggaran
2.	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat
3.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 22.948.828.294,-
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.217.380.000,-
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 395.515.000,-
Jumlah	Rp. 24.561.723.294,-

Palu, 08 November

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



SAGUM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

MAJNI JULIA KOROM
Pembina Tkt. I,
NIP. 19660704 1998

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Progr
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembid dan Pengawasan
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Apa Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.312.610.000,-
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 19.950.000,-
Jumlah	Rp. 1.332.560.000,-

Palu, 08 M

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Irban
Inspektur
Provinsi S



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197212302000121004

SALIM
Pembina
NIP 197212302000121004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di

Nama : **Drs. MAULANA AMIR M.SAINALLAH, M.Si**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH II Inspektorat Daerah Provinsi**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang terdapat dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 N

PIHAK KEDUA,

PIHAK PI

**Plt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**IRBAN WI
INSPEKTOR
PROVINSI SULA**



SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

Drs. MAULANA AMIR
Pembina T
NIP. 1966123

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

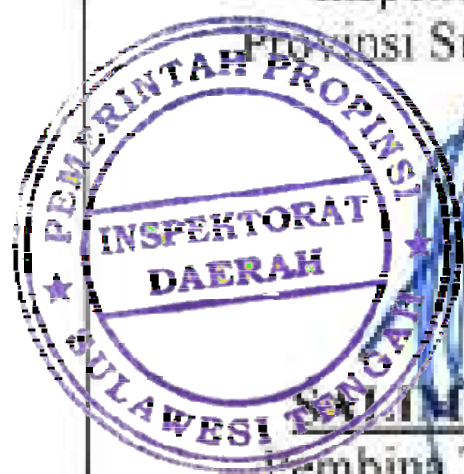
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Program	Anggaran	K
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.314.690.000,-	
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 27.000.000,-	
Jumlah	Rp. 1.341.690.000,-	

Palu, 08 November

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Irban Wilayah
Inspektorat Daer
Provinsi Sulawesi



Dr. H. S. Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19721230 200012 1 004

Dr. MAULANA AMIR M. S.
Pembina Tkt. I,
NIP. 19661231 1996



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di

Nama : **ATJO RIZAL, SH.,M.Si**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH III Inspektorat Daerah Provinsi**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang s lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 N

PIHAK KEDUA,

PIHAK P

**Plt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**IRBAN W
INSPEKTOR
PROVINSI SUL**



SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

ATJO RIZAL
Pembina
NIP. 1970121

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.461.654.000,-
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 30.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.494.654.000,-

Palu, 08 Nover

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

Irbani Wilay
Inspektorat
Provinsi Sulaw

ATJO RIZAL
Pembina Tkt
NIP. 19701210 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di

Nama : **HARIS H.M SALIM, SE.,MM**

Jabatan : **IRBAN WILAYAH IV Inspektorat Daerah Provinsi**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang terdapat dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengamalkan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 N

PIHAK KEDUA,

PIHAK I

**Plt. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**IRBAN W
INSPEKTO
PROVINSI SUI**



SALIM, M. S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004


HARIS H.M
Pembina
NIP. 196606

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

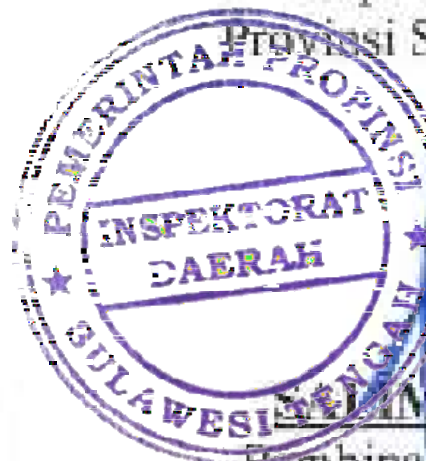
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.124.720.000,-
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 27.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.151.720.000,-

Palu, 08 Nove

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Irban Wila
Inspektorat
Provinsi Sulaw



H.M. S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

HARIS H.M SAL
Pembina Tk
NIP. 19660602 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di

Nama : **IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang terdapat dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengamalkan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 09 Nove

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si

Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

IKHWAN SYAM

Pembina
NIP. 19801111 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/su
(1)	(2)	(3)
1.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pe Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan - Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi K
2.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan - Jumlah Orang yang Menerima C Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akh dan Laporan Hasil Koordinasi P Laporan Keuangan Akhir Tahun
3.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Bara - Jumlah Laporan Rekonsiliasi da Laporan Barang Milik Daerah P
4.	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Bahan/Material - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Baran - Jumlah Paket Peralatan dan Per yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan d yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan/Material y - Jumlah Laporan Penyelenggara Koordinasi dan Konsultasi SKP
5.	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Baran Penunjang Urusan Pemerintah Da - Jumlah Unit Peralatan dan Mes disediakan
6.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah - Jumlah Laporan Penyediaan Jas Sumber Daya Air dan Listrik ya - Jumlah Laporan Penyediaan Jas Umum Kantor yang disediakan
7.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Bar Penunjang Urusan Pemerintahan - Jumlah Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin La dipelihara - Jumlah Gedung Kantor dan Ba

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub
(1)	(2)	(3)
8.	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	- Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	- Jumlah Kesepakatan Pengawasan terbentuk
	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	- terselesaikan Penanganan Kerugian Negara/Daerah	- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah yang Ditangani
	- Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
10.	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	- Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawasan yang disusun
11.	Terlaksananya Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
	- Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	- Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	- Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.000.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.000.000.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.000.000.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.000.000.000
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.000.000.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 0
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 1.000.000.000
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.000.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.000.000.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.000.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 0
	- Penyediaan Bahan/Material	Rp. 0
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 0
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.000.000.000
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.000.000.000
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.000.000.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.000.000.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 0

	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 618.738.515	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 120.450.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 51.620.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 446.668.515	
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.135.180.000	APBD
	- Kerja sama pengawasan Internal	Rp. 431.840.000	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 703.340.000	
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 82.200.000	APBD
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Rp. 0	
	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 82.200.000	
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 10.725.000	
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan	Rp. 10.725.000	
11	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 384.790.000	APBD
	- Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 170.790.000	
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 214.000.000	
	- Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Rp. 0	
	Jumlah	Rp. 23.246.439.444	

Palu, 09 November 2023

Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI SARINTAN , S.Sos., MM**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 09 November 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/h
NIP. 19660704 199803 2 003


SRI SARINTAN , S.Sos., MM
Pembina. IV/a
NIP. 19801111 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang
	- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	740 Orang

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		APBD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 321.950.000,-	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 931.996.350,-	
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 61.337.500,-	
Jumlah	Rp. 1.315.283.850,-	

Palu, 09 November 2023

Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



MARNI JULIA KOROMPOT, SH., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660704 199803 2 003

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

SRI SARINTAN, S.Sos., MM
Pembina IV/a
NIP.19730106 199203 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Bidang : Bidang Pengawasan
Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
U P B : Inspektorat Daerah

NO. KODE LOKASI : 11.01.20.00.14.01.01.01.2023

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.3.2.05.001.005.055	000001 s/d 000006	Projector Spider Bracket	acer / XGA (1,124X768)	-	-	Pembelian	2023			Baik	6	75.600.000,00	Harga Satuan : 12.600.000,00
2	1.3.2.05.002.001.030	000417 s/d 000466	Kursi Rapat	INDACHI / Stackable	-	-	Pembelian	2023			Baik	50	38.500.000,00	Harga Satuan : 770.000,00
3	1.3.2.05.002.001.030	000467 s/d 000516	Kursi Rapat	- / Kursi Susun	-	-	Pembelian	2023			Baik	50	38.900.000,00	Harga Satuan : 778.000,00
4	1.3.2.05.002.001.031	000002	Kursi Tamu	Sofa / Midilli Grate A	-	-	Pembelian	2023			Baik	1	35.800.000,00	
5	1.3.2.05.002.001.048	000011	Sofa	- / -	-	-	Pembelian	2023			Baik	1	8.250.000,00	
6	1.3.2.05.002.004.001	000004 s/d 000009	Lemari Es	Panasonic	-	-	Pembelian	2023			Baik	6	24.840.000,00	Harga Satuan : 4.140.000,00
7	1.3.2.05.002.004.004	000071 s/d 000076	A.C. Split	Panasonic / Low watt	-	-	Pembelian	2023			Baik	6	30.000.000,00	Harga Satuan : 5.000.000,00
8	1.3.2.05.002.004.004	000077 s/d 000080	A.C. Split	Sharp / -	-	-	Pembelian	2023			Baik	4	113.800.000,00	Harga Satuan : 28.450.000,00
9	1.3.2.05.002.006.018	000003 s/d 000008	Unit Power Supply	Prolink / 1200 VA	-	-	Pembelian	2023			Baik	6	14.700.000,00	Harga Satuan : 2.450.000,00
10	1.3.2.05.003.001.006	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	-	-	Pembelian	2023			Baik	1	8.300.000,00	
11	1.3.2.05.003.002.005	000001 s/d 000002	Meja Rapat Pejabat Eselon III	MDF / -	-	-	Pembelian	2023			Baik	2	30.400.000,00	Harga Satuan : 15.200.000,00
12	1.3.2.05.003.003.005	000006 s/d 000008	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Tiger / Bantalan Gabus	-	-	Pembelian	2023			Baik	3	7.980.000,00	Harga Satuan : 2.660.000,00
13	1.3.2.06.001.002.002	000001	Off Air TV Monitor	LG / TV Include	-	-	Pembelian	2023			Baik	1	48.900.000,00	
14	1.3.2.06.001.002.154	000001	Kamera Stile	- / -	-	-	Pembelian	2023			Baik	1	20.000.000,00	
15	1.3.2.10.001.002.002	000117	Lap Top	Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 131RPH / iPad	-	-	Pembelian	2023			Baik	1	28.833.500,00	
16	1.3.2.10.001.002.002	000118 s/d 000126	Lap Top	Acer Travel Mate P214 / Laptop TKDN	-	-	Pembelian	2023			Baik	9	152.100.000,00	Harga Satuan : 16.900.000,00
17	1.3.2.10.002.003.003	000094 s/d 000106	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Acer / Trave Mate P214	-	-	Pembelian	2023			Baik	13	193.284.000,00	Harga Satuan : 14.868.000,00
18	1.3.2.10.002.003.003	000107 s/d 000120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3210	-	-	Pembelian	2023			Baik	14	75.600.000,00	Harga Satuan : 5.400.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUKU INVENTARIS

19	1.3.2.10.002.003.004	000007 s/d 000012	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson / DS-410	-	-	Pembelian	2023			Baik	6	40.800.000,00	Harga Satuan : 6.800.000,00
Jumlah												986.587.500,00		


MENGETAHUI
Pih. Inspektur Daerah Prov. Sulteng



SALIM, S.SOS. M.SI
NIP. 19721230 200012 1 004



PALU, 3 Januari 2024
PENGURUS BARANG PENGGUNA



SUWANDI, SE
NIP. 19840512 201502 1 001

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (sampai dengan Triwulan IV)**

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sd. RKPD Provinsi Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2026 (%)		Keterangan			
					Target Tahun 2023		I		II		III		IV		13+9-10+11+12		14+7+13		15+13/8 x 100%		16+14/6 x 100%		Kendala Pencapaian Target Prog/ Keg/Sub Kegiatan	Tindak Lanjut/Strategi						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13+9-10+11+12	14+7+13	15+13/8 x 100%	16+14/6 x 100%	17	18													
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				INSPEKSI PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																										
				INSPEKTORAT DAERAH																										
1	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai	86	27,334,330,000	71.74	20,804,546,024	74	22,948,828,294	-	2,721,136,267	-	6,969,767,315	81.30	4,246,909,399	81	7,884,412,994	81.3	21,822,225,966	153.04	42,626,771,990	110	95	177.95	156			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92		77.75		85								82		82		159.75		96		173.64				
				Persentase Realisasi Anggaran	%	98		98.53		98		14.19			31.47				28.74		93.57		192.10		95		196.02			
		01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	750,000,000	8	73,953,450	3	2,844,850	1	2,844,850	-	-	-	-	-	1	2,844,850	9	76,798,300	33	100.00	90	10.24				
	Meningkatnya Nilai Mutuas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	01 01 1.04 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	600,000,000	6	71,988,450	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00					
		01 01 1.04 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	150,000,000	2	1,965,000	2	2,844,850	1	2,844,850	-	-	-	-	1	2,844,850	4	4,809,850	100	100	100	100	3.21				
		01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	2	20,289,037,623	2	15,505,720,560	2	16,905,231,164	0.25	1,719,983,165	0.25	5,890,219,010	0.25	3,527,291,913	0.25	4,793,675,278	1	15,931,169,366	3.00	31,436,889,926	50	94.24	150	154.95			
		01 01 1.04 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	115	19,889,037,623	115	15,351,880,560	110	16,724,351,164	110	1,696,003,165	110	5,832,259,010	110	3,503,311,913	109	4,718,715,278	110	15,750,289,366	110	31,102,129,926	100	94.18	96	156.38			
		01 01 1.04 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	400,000,000	1	153,880,000	1	180,880,000	1	23,980,000	-	57,960,000	-	23,980,000	-	74,960,000	1	180,880,000	2	334,760,000	100	100.00	100	83.60			
		01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	300,000,000	2	87,410,000	1	76,960,000	0.25	9,360,000	0.25	18,720,000	0.25	9,360,000	0.25	39,270,000	1	76,710,000	3.00	164,120,000	100	99.68	150	54.71			
		01 01 1.03 01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	300,000,000	2	87,410,000	1	76,960,000	0.25	9,360,000	0.25	18,720,000	0.25	9,360,000	0.25	39,270,000	1	76,710,000	2.75	164,120,000	75	99.68	138	54.71			
		01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1,150,000,000	1	667,542,088	1	1,315,283,850	0.25	100,870,000	0.25	360,396,794	0.25	150,255,452	0.25	638,444,177	1	1,249,966,423	2	1,917,508,511	100	95.03	200	166.74			
		01 01 1.02 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	250,000,000	1	122,580,000	1	321,950,000	0.25	28,800,000	0.25	29,175,000	0.25	8,600,000	0.25	222,175,000	1	288,750,000	2.00	411,330,000	100	89.69	100	164.53			
		01 01 1.02 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	600,000,000	48	487,562,288	26	931,996,350	12	71,710,000	4	278,607,944	10	133,715,452	-	416,269,177	26	900,302,573	74	1,387,864,861	100	96.60	247	231.31			
		01 01 1.03 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	850	300,000,000	595	57,399,800	740	61,337,500	360	360,000	310	52,613,850	70	7,940,000	-	-	740	60,913,850	1,335	118,313,650	100	99.31	157	39.44			
		01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	4	1,150,000,000	4	892,970,694	4	1,437,921,680	1	113,430,520	1	264,020,880	1	165,116,442	1	878,710,272	4	1,421,278,114	8	2,314,248,808	100	98.84	200	201.24			
		01 01 1.04 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	50,000,000	1	5,788,806	1	5,810,550	1	-	-	5,786,900	-	-	-	1	5,786,900	2	11,575,706	100	99.59	200	23.15				
		01 01 1.04 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	50,000,000	1	17,050,325	1	46,401,050	0.25	7,643,150	0.25	12,509,500	0.25	7,505,700	0.25	18,742,700	1	46,401,050	2	63,451,375	100	100.00	200	126.90			
		01 01 1.04 01	Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	450,000,000	1	198,000,000	1	245,000,000	0.25	61,250,000	0.25	61,250,000	0.25	61,250,000	0.25	61,250,000	1	245,000,000	2	443,000,000	100	100	200	98.44			
		01 01 1.04 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	600,000,000	1	672,131,563	1	1,140,710,000	0.25	44,537,370	0.25	184,474,480	0.25	96,360,742	0.25	798,717,572	1	1,124,090,164	2	1,796,221,727	100	98.54	200	299.37			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sd. RKPD Provinsi Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2026 (%)	Keterangan								
							Target Tahun 2023		I		II		III		IV						Kendala Pencapaian Target Prog/ Keg/Sub Kegiatan	Tindak Lanjut/Strategi							
01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	600,008,927	1	2,064,978,981	1	995,641,862	1	476,464,000	-	-	-	510,123,500	1	986,587,500	2	3,051,566,481	100	99	200	508.59				
01	01	1.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	600,008,927	189	2,064,978,981	181	995,641,862	104	476,464,000	-	-	-	510,123,500	181	986,587,500	370	3,051,566,481	100	99	37000	508.59				
01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2,039,488,487	2	1,271,775,251	2	1,596,206,453	0.50	287,865,732	0.50	385,291,448	0.50	373,617,641	0.50	492,540,942	2	1,539,314,363	4	2,811,890,114	100	96.44	200	137.83		
01	01	1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	300,000,000	12	326,437,224	1	366,862,553	0.25	54,891,382	0.25	108,701,888	0.25	82,492,041	0.25	112,804,342	1	358,970,013	13.00	686,307,237	100	98.06	100	171.33	Pembayaran Pajak Rumah Dinas Tahun 2023 nilainya kurang dari paga, tetapi terbayarkan full	
01	01	1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1,639,488,487	1	945,438,027	1	1,230,142,900	0.25	232,973,750	0.25	276,509,600	0.25	291,124,800	0.25	379,736,700	1	1,180,344,850	2.00	2,125,782,877	100	95.95	200	129.66	Pembayaran Langganan jurnal/surat sudah terbayarkan full	
01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	1,055,797,963	3	240,195,000	3	618,738,515	0.75	10,318,000	0.75	51,119,183	0.75	21,267,942	0.75	531,649,725	3	614,354,850	6.00	854,549,850	100	99.29	200	80.94		
01	01	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	300,000,000	13	198,272,000	13	120,450,000	13	143,000	13	39,866,683	13	10,367,942	13	66,939,475	13	117,317,100	13	275,289,100	100	97.40	1300	68.90	Pembayaran Pajak Kendaraan nilainya kurang dari paga, tetapi terbayarkan full	
01	01	1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	100,000,000	74	61,931,000	62	51,620,000	16	925,000	16	11,252,500	15	10,900,000	15	28,488,250	62	51,565,750	136	113,496,750	100	99.89	13600	113.50	Pemeliharaan Meminimalisir (Penggunaan Suku Cadang) hanya dilaksanakan 1 kali	
01	01	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	555,797,963	1	19,992,000	2	446,668,515	2	9,250,000	-	-	-	-	436,222,000	2	445,472,000	3	465,464,000	100	99.73	100	83.73			
01	02		PROGRAM PENGAWASAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	83	1,642,630,000	66	3,160,674,925	77	6,431,054,000	0	1,058,150,000	59.38	1,425,752,000	65.69	739,695,000	65.09	2,656,250,667	125	5,879,847,667	191.07	5,879,847,667	162.43	91.43	230.20	357.95		
				Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Hjen Kecamatan	%	94		94		88		0	61.70		89		91.50		151		244.70		171.25		260.32				
				Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoral	%	92		75		80		0	13.94		66.58		69.65		81		155.32		100.65		169.04				
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	97.34		84.62		64.10		28.21	25.64		38.46		34.33		126		210.26		196.01		215.79				
01	02	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Vertikalitasnya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	452	1,108,880,000	663	3,107,777,675	605	6,054,634,000	243	1,042,250,000	153	1,395,002,000	50	724,245,000	151	2,434,850,667	416	5,396,347,667	1,109	8,704,125,342	74	92.43	245	784.95		
01	02	1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	57,003,000	24	115,158,000	214	2,113,584,000	40	190,430,000	73	891,132,000	19	387,890,000	82	418,851,000	132	1,890,383,000	156	2,005,461,000	62	89.44	325	3518.17	Sisa Biaya Perjalanan Dinas dari jumlah Anggota Tim yang melaksanakan jumlah	
01	02	1.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	192	57,003,000	74	115,863,625	309	2,543,750,000	198	809,220,000	66	211,420,000	27	190,680,000	18	1,258,310,000	291	2,469,630,000	365	2,585,493,625	94	97.09	190	4535.72		
01	02	1.01	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	170	550,000,000	183	838,845,500	4	29,700,000	2	7,200,000	-	-	2	12,000,000	-	5,250,000	4	24,450,000	187	863,295,500	100	82.32	110	156.96	Sisa Biaya Perjalanan Dinas dari jumlah Anggota Tim yang melaksanakan jumlah	
01	02	1.01	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	8	50,000,000	328	1,183,848,450	68	232,500,000	2	14,400,000	13	6,300,000	2	8,250,000	51	142,200,000	17	171,150,000	345	1,354,998,450	25	73.61	4313	2710.00	Sisa Biaya Perjalanan Dinas dari jumlah Anggota Tim yang melaksanakan jumlah dan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	
01	02	1.01	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	53,000,000	1	75,671,475	1	431,840,000	-	-	1	89,580,000	-	-	-	278,940,060	1	368,520,060	2	444,191,535	100	85.34	200	838.10	Narasumber dari KPK tidak dibayarkan Honorariumnya dikarekakan Narasumber dari KPK tidak menerima pembayaran dari OPD, tidak diperkenankan memberi cedramata, Selsih harga Tiket/Hotel Narasumber dan Tiket Hotel Narasumber tidak dibayarkan dikarekakan narasumber dari KPK tidak menerima pembayaran dari OPD	
01	02	1.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen	33	341,874,000	53	778,390,625	9	703,340,000	1	21,000,000	-	194,570,000	-	125,425,000	-	331,298,917	1	672,293,917	54	1,450,684,542	11	95.59	164	424.33		
01	02	1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Vertikalitasnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	18	533,750,000	7	52,897,250	14	376,420,000	3	15,900,000	4	30,750,000	2	15,450,000	-	221,400,000	9	283,500,000	16	336,397,250	64	75	89	63.03		
01	02	1.02	Pengawasan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	8	35,750,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00			
01	02	1.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	500,000,000	7	52,897,250	14	376,420,000	3	15,900,000	4	30,750,000	2	15,450,000	5	221,400,000	9	283,500,000	16	336,397,250	64	75.31	160	67.20	Selsih biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan karena jumlah anggota yang melaksanakan tugas lainnya, dan dari Laporan atau Penguan Masuk pada Inspektoral	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Level	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sd. RKPD Provinsi Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi				Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2026 (%)		Keterangan				
						4	467,200,000	3	660,429,412	3	499,465,000	-	22,500,000	-	111,510,000	-	151,500,000	-	201,115,027	-	486,625,027	3	1,147,054,439	-	97.43	75	245.52	Kendala Pencapaian Target Prog/ Keg/Sub Kegiatan	Tindak Lanjut/Strategi	
						Target Tahun 2023	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi sd. Tahun 2026 (%)																
3		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	4	467,200,000	3	660,429,412	3	499,465,000	-	22,500,000	-	111,510,000	-	151,500,000	-	201,115,027	-	486,625,027	3	1,147,054,439	-	97.43	75	245.52			Menunggu Penilaian dari BPKP
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	1	20,000,000	1	121,576,900	1	10,725,000	-	-	-	-	-	-	-	1	10,725,000	1	10,725,000	2	132,301,900	100	100.00	200	661.51		
		6.01.03.1.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rekomend asi	1	20,000,000	1	121,576,900	1	10,725,000	-	-	-	-	-	-	-	1	10,725,000	1	10,725,000	2	132,301,900	100	100.00	200	661.51		
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	69	447,200,000	110	538,852,512	6	488,740,000	1	22,500,000	2	111,510,000	1	151,500,000	2	190,390,027	6	475,900,027	116	1,014,752,539	100	97.37	168	226.91			
		6.01.03.1.02.42	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	48	152,178,527	48	332,913,925	48	274,740,000	48	22,500,000	48	29,400,000	48	111,150,000	48	111,560,000	48	274,610,000	48	607,523,925	100	99.95	100	399.22			
		6.01.03.1.02.33	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kegiatan	11	155,569,750	11	177,875,587	2	214,000,000	-	-	1	82,110,000	-	40,350,000	1	78,830,027	2	201,290,027	13	379,165,614	100	94.06	118	243.73	Makan dan Minum Kegiatan Saber Pungli tidak diambil anggarannya, untuk narasumber tidak dilaksanakan kegiatannya sehingga anggarannya tidak digunakan		
		6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat daerah	10	139,451,723	0	28,063,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00			
Jumlah						100	29,444,160,000	97.59	24,625,650,361	100%	29,079,347,294	12.72	3,001,706,267	28.47	0,507,029,315	17.20	5,138,104,390	35.95	10,741,770,688	94.34	20,180,698,660	191.93	52,814,349,021	94.34	191.93	179.37				
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Predikat kinerja																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :						- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan - Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						- Terdapat Kegiatan yang ditiadakan atau tidak dilaksanakan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :						Maksimal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya pada triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD						- Kegiatan yg belum dapat dilaksanakan dialokasikan kembali pada RKPD berikutnya																								

Mengetahui,
Plh. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



SALIM S.Sos. M.Si
NIP. 19721230 200012 2 004